

**KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN WILAYAH BERBASIS
SEKTOR PERTANIAN; ANALISIS PADA SEKTOR
PERIKANAN BUDIDAYA DI KECAMATAN LIANG,
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Oleh:

**TRI NOVIANTI
21040112420085**

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 24 Desember 2014

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 31 Desember 2014

Tim Penguji:

Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP – Pembimbing :

Samsul Ma'rif, SP, MT – Penguji :

Dr. Iwan Rudiarto, ST, M.Sc – Penguji :

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Pembangunan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, M.Sc

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam tesis ini ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari tesis orang lain/ institusi lain maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab.

Semarang, Desember 2014

TRI NOVIANTI
NIM 21040112420085

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Diponegoro, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI NOVIANTI
NIM : 21040112420085
Jurusan/Program Studi : MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
Departemen : PERENCANAN WILAYAH DAN KOTA
Fakultas : TEKNIK
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Diponegoro **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN WILAYAH BERBASIS SEKTOR
PERTANIAN; ANALISIS PADA SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA DI
KECAMATAN LIANG, KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Diponegoro berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan in saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang
Pada Tanggal : 30 Desember 2014

Yang menyatakan

(Tri Novianti)

**“Tidak ada yang mustahil jika Allah Swt berkehendak...percayalah
badai selalu menyisakan pohon- pohon terkuat”**

*Karya Kecil Ini Saya Persembahkan Untuk Mama Dan Papa Tercinta
(Hj. Sulastri Malingong, S.pd & Hamri Jambata, S.Pd)
Ketiga saudaraku (Moh. Zamrud, S.Pi, Nurhadi, S.Sos, Moh. Farhan)
Keluarga dan sahabat setia*

ABSTRAK

Banyaknya kebijakan pemerintah pusat dalam hal pengembangan wilayah yang terkadang kurang sesuai dengan kondisi wilayah yang ada, sehingga masyarakat tidak menerima perencanaan program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Salah satu faktor keberhasilan pengembangan wilayah adalah pengembangan kelembagaan oleh karena itu pengembangan kelembagaan perlu memperoleh perhatian khusus yang melibatkan banyak pihak. Masyarakat pedesaan yang ditunjukkan oleh sebagian besar pendapatannya dari produk pertanian seperti tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan sehingga sektor ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Salah satu kesulitan untuk mengembangkan sektor pertanian adalah masalah kelembagaan yang belum dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Kelembagaan sektor pertanian yang bertanggung jawab terhadap upaya untuk mendorong peningkatan usaha sektor pertanian belum didukung oleh komitmen bersama secara sinergis antara pemerintah dan masyarakat.

Sebagai kabupaten yang sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh laut, sektor utama yang berkembang adalah sektor pertanian khususnya sektor perikanan sehingga dominasi kawasanpun diwarnai oleh potensi perikanan yang melimpah. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya didukung oleh kinerja kelembagaan yang baik, baik kelembagaan formal maupun kelembagaan non formal. Dalam konteks kelembagaan petani/ nelayan, telah terbentuk kelembagaan non formal seperti kelompok tani/ nelayan namun perannya belum optimal. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar pembentukan kelembagaan kelompok tani/ nelayan tersebut hanya untuk mendapatkan bantuan pemerintah, disamping itu masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh para petani/ nelayan seperti akses terhadap modal, harga pasar yang belum memihak kepada petani, payung hukum yang belum jelas.

Berdasarkan hal tersebut maka penting untuk mengetahui “bagaimana hubungan kelembagaan yang terkait dengan kegiatan sektor perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya di kecamatan Liang?” Tujuan penelitian ini adalah mengkaji hubungan kelembagaan dalam pengembangan wilayah berbasis sektor pertanian dengan analisis pada sektor perikanan budidaya.

Dalam penelitian ini dilakukan tiga analisis utama yaitu Analisis sistem regulasi, analisis organisasi yang terlibat, dan analisis hubungan antar aktor. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan adalah teknik purposive sampling yang didasarkan pada sumber data yang diperoleh dari data primer melalui observasi lapangan dan wawancara. Disamping itu juga dilengkapi dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari telaah dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya sistem regulasi daerah yang mengatur kegiatan kelembagaan petani/ nelayan, kebijakan yang dikeluarkan hanya berdasarkan program kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga hanya bersifat sementara dan tanpa tujuan yang jelas. Pada dasarnya sudah terbentuk kelembagaan khususnya sektor perikanan baik formal maupun non formal namun belum menunjukkan adanya hubungan terorganisir baik antara lembaga pemerintah dengan lembaga masyarakat maupun hubungan individu antara kelembagaan tersebut. Hubungan yang terjalin hanya bersifat sementara karena adanya proyek pemerintah

Kata kunci: Pengembangan Wilayah, Kelembagaan, Sektor Pertanian

ABSTRACT

The central government policy in term of regional development, sometimes lacking with the condition of existing area, so people do not accept the plan issued by the central government. One of the success factors for regional development is the institutional development needs to obtain special attention involving many parties. Rural communities are shown by the majority of their income from agricultural products such as food crops, plantation, farming, fishing, and forestry so that this sector needs to get special attention. One difficulty to develop the agricultural sector is a matter of institutional yet can serve as expected. Institutional agricultural sector is responsible for efforts to encourage agricultural sector has not been supported by a shared commitment in synergy between the government and society.

As a district that most of its territory surrounded by the sea, the main sectors are growing is the agricultural and fisheries sector. However, this potential has not been fully supported by institutional, both formal and informal institutions. In the context of institutional fishermen and farmers, has formed non formal institution as farmer groups fishermen but its role is not optimal. That is because most of the formation of farmers / fishing institution is just to get government assistance. Besides that there are still many problems faced by the fishermen and farmers such as access to capital, the market price that has not favoring to farmers and a legal framework which has not yet clear.

Based on this, it is important to know "how institutional relationships associated with the activities of the fisheries sector in improving public welfare of farmers in the Liang district?" The purpose of this research is to assess institutional relations in the regional development the agricultural sector with the analysis in the sector of aquaculture.

In this research done three main analysis regulatory system analysis, organization analysis, and actor relationship analysis. Research approach that is used is a qualitative approach and descriptive analysis method. The technique used is purposive sampling technique based on source data obtained from the primary data through field observations and interviews. Besides that also equipped with the collection of secondary data obtained from the review of documents.

The results showed that there are not yet local government institution to support farmers / fishermen activities. The policy issued only based on a program of activities that will be implemented so that only temporary and without a clear purpose. Basically, had been formed formal dan nonformal fisheries institutional, but not yet shown an association organized between government with civil society organizations. The relation of being interwoven only temporary because of the government projects.

Keywords: Regional Development, Institutional, Agriculture

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah langkah kecil dari sebuah perjalanan panjang telah diayunkan. Sebuah ungkapan syukur sangat layak dipanjatkan kehadirat Allah swt, setidaknya satu tahapan telah coba ditempuh dan dituntaskan, walaupun tahap berikutnya telah menanti untuk coba dijalankan. Semoga ini bukanlah merupakan awal dari suksesnya sebuah kegagalan namun menjadi pintu pembuka bagi kesuksesan berikutnya. Dalam penyusunan laporan penelitian ini, penyusun mendapatkan bantuan dari banyak pihak. Untuk itu, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Lania Laosa, selaku Bupati Banggai Kepulauan yang telah memberikan kesempatan Tugas Belajar
2. Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, M.Sc selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro
3. Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan tesis ini.
4. Samsul Ma'rif, SP,MT, selaku dosen penguji yang memberikan masukan dalam perbaikan tesis ini.
5. Dr. Iwan Rudiarto, ST, M.Sc, selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dalam perbaikan tesis ini.
6. Seluruh dosen dan staf Magister pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro atas ilmu dan bantuan selama menempuh perkuliahan.
7. Keluarga besar MPWK UNDIP angkatan 2012/2013 dan tim Perencanaan Pengembangan Wilayah (mbak Wiwik, Reni, Retno,Aul, Ratika, Ayu, Ulis, Pak Pinto, Yusril, Imam) terima kasih untuk kebersamaan yang terjalin.
8. Sahabat- sahabat terkasih khususnya Evi Sunaryanti, ST, M.Sc(kandidat) terima kasih untuk waktu dan bantuannya.
9. Semua pihak lainnya yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa laporan penelitian ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki laporan ini. Semoga laporan penelitian akhir ini dapat berguna bagi seluruh pihak.

Semarang, Desember 2014

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Halaman Publikasi	iv
Halaman Persembahan	v
Abstrak	vi
Abstrack	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah Penelitian	7
1.3 Tujuan dan Sasaran	8
1.3.1 Tujuan	8
1.3.2 Sasaran	8
1.4 Ruang Lingkup.....	8
1.4.1 Lokasi Penelitian.....	9
1.4.2 Ruang Lingkup Substansial	11
1.5 Keaslian Penelitian	12
1.6 Manfaat Penelitian	13
1.7 Kerangka Pikir	13
1.8 Metode Penelitian	15
1.8.1 Objek Penelitian.....	15
1.8.2 Data Penelitian	16
1.8.3 Analisis Data.....	19
1.9 Sistematika Penulisan	25

BAB II KAJIAN LITERATUR : KELEMBAGAAN LOKAL DAN PENGEMBANGAN WILAYAH BERBASIS SEKTOR PRIMER

2.1 Pengembangan wilayah Berbasis Sektor Primer	28
2.1.1 Pengembangan Wilayah Pedesaan	29
2.1.2 Permasalahan Lokalitas pada sektor Primer.....	34
2.1.3 Kemiskinan pada sektor primer.....	35
2.1.4 Upaya – upaya pengembangan wilayah berbasis sektor primer	36
2.2 Sektor Perikanan Sebagai Sektor Potensial di wilayah Pesisir.....	39

2.3	Kelembagaan sebagai faktor penggerak pembangunan	41
2.3.1	Definisi Kelembagaan	41
2.3.2	Kelembagaan Lokal	43
2.3.3	Bentuk Kelembagaan Lokal	44
2.3.4	Tingkatan dalam Kelembagaan Lokal.....	45
2.3.5	Kelembagaan Sektor Primer.....	46

BAB III SEKTOR PERIKANAN SEBAGAI SEKTOR POTENSIAL DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

3.1	Gambaran Umum Kab. Banggai Kepulauan.....	53
3.2	Struktur Perekonomial Kabupaten Banggai Kepulauan	53
3.3	Gambaran Sektor Perikanan Di Kabupaten Banggai Kepulauan.....	57
3.4	Kondisi Sektor perikanan budidaya di Kabupaten Banggai Kepulauan	59
3.5	Potensi dan Permasalahan Sektor Perikanan Budidaya	63
3.6	Gambaran Umum Kecamatan Liang	65
3.6.1	Tingkat Pendidikan	66
3.6.2	Potensi Sektor Perikanan Budidaya di Kecamatan Liang	67
3.7	Kelembagaan Lokal Sektor Perikanan	70
3.7.1	Kelembagaan Formal	71
3.7.2	Kelembagaan non formal	80

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Analisis Sistem Regulasi Kelembagaan Sektor Perikanan	84
4.1.1	Kebijakan Umum Sektor Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.....	84
4.1.2	Keunggulan dan Keterbatasan Kebijakan	85
4.1.3	Kepastian Aturan Hukum/ Kebijakan	87
4.2	Analisis Organisasi Yang Terlibat	89
4.2.1	Implementasi Tupoksi Organisasi.....	89
4.2.2	Efektivitas dan Kesesuaian Program bantuan dengan Kebutuhan Masyarakat	99
4.2.3	Pendanaan	102
4.3	Analisis Hubungan Antar Aktor	105
4.3.1	Aktor Yang Terlibat	106
4.3.2	Hubungan Antar Aktor	109
4.3.3	Kegiatan Perikanan Budidaya.....	111
4.4	Sintesa Hasil Penelitian.....	113

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	116
5.2	Rekomendasi	118
5.3	Keterbatasan Penelitian	118

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

I.1	PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan ADHK (2009- 2013).....	5
I.2	Keaslian Penelitian.....	12
I.3	Kebutuhan Data.....	16
I.4	Pengkodean Data Hasil Wawancara	18
II.1	Perbandingan Pendekatan Lama dan Baru dalam Pembangunan Pedesaan	31
II.2	Permasalahan Wilayah Pesisir ditinjau dari beberapa aspek	40
II.3	Tiga Sektor dalam Kelembagaan	45
III.1	PDRB ADKH Kab Banggai Kepulauan	54
III.2	Sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kab. Banggai Kepulauan	54
III.3	Produksi Perikanan Tangkap tahun 2011-2012	58
III.4	Potensi dan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2011.....	58
III.5	Jumlah Perahu Menurut Jenis Kapal.....	59
III.6	Potensi dan Pemanfaatan Lahan Budidaya Laut.....	60
III.7	Potensi dan Permasalahan Sektor Perikanan.....	64
III.8	Letak Geografis Menurut Desa Di Kecamatan Liang.....	66
III.9	Produksi Rumput Laut di Kabupaten Banggai Tahun 2009	67
III.10	Kebijakan dan Program DKP Kabupaten Banggai Kepulauan.....	76
III.11	Kebijakan dan Program BKP3 Kabupaten Banggai Kepulauan.....	79
IV.1	Bentuk Kebijakan terkait kelembagaan Sektor Perikanan	88
IV.2	Jenis Bantuan yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat/ kelompok.....	100
IV.3	Matriks Peran Kelembagaan dalam Kegiatan Sektor Perikanan.....	104
IV.4	Matriks Hubungan Antar Organisasi yang terlibat dalam kegiatan sektor Perikanan	110
IV.5	Temuan Studi Penelitian	113

DAFTAR GAMBAR

1.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Banggai Kepulauan.....	9
1.2	Peta Wilayah Kecamatan Liang	10
1.3	Kerangka Pikir	14
1.2	Komponen- komponen Analisis Data	20
1.3	Tahap Analisis Sistem Regulasi.....	21
1.4	Tahap Analisis Organisasi Yang Terlibat	22
1.5	Tahap Analisis Hubungan Antar Aktor.....	23
1.6	Kerangka Analisis Penelitian	24
2.1	Perangkap kemiskinan sektor masyarakat tradisional.....	36
2.2	Kerangka berpikir transformasi menurut Downwards et al	37
2.3	Kerangka Konsep peran infrastruktur dalam pembangunan pertanian	38
2.4	Tingkatan dalam pengambilan keputusan	46
3.1	Ilustrasi Rantai Pasokan Komuditas Rumput Laut	61
3.2	Ilustrasi Rantai Pasokan Komuditas Ikan Kerapu/ Napoleon	62
3.3	Lokasi Pembudidayaan Ikan	63
3.4	Pendekatan Pembangunan Infrastruktur dalam menunjang revitalisasi sektor perikanan	65
3.7	Lokasi dan Kegiatan Pembudidayaan Rumput Laut.....	68
3.8	Budidaya Keramba Jaring Tancap	70
4.1	Pelatihan Kebun Bibit Rumput Laut	92
4.2	Salah Satu Kelompok Pembudidaya	96
4.3	Permasalahan Kelompok Pembudidaya dan Upaya Penanganannya.....	97
4.4	Sistem Kegiatan Hulu- Hilir Pembudidayaan Rumput Laut.....	111
4.5	Sistem Kegiatan Hulu- Hilir Pembudidayaan Ikan Napoleon/ Kerapu	112